

Politik Perdagangan Kedelai Indonesia dan Prospek Pasar Global: Potensi dan Kontribusi Lampung

Rahayu Lestari*, Luerdi, Nibras Fadhlillah, Afiyah Nur Kamilah

Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung

*rahayu.lestari@fisip.unila.ac.id

Abstrak

Ketergantungan kedelai Indonesia mencerminkan persoalan resiliensi pangan dalam struktur ekonomi politik internasional, sekaligus isu keadilan distribusi dan kemaslahatan yang relevan dengan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara ketergantungan impor, diversifikasi pasokan, peluang pasar produk turunan kedelai, dan kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi domestik. Dengan pendekatan kualitatif berbasis telaah dokumen kebijakan, data perdagangan, dan literatur akademik, kajian ini menempatkan kedelai sebagai komoditas strategis yang dipengaruhi relasi kuasa pasar global, diplomasi komoditas, dan tata kelola pangan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 97% kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap volatilitas harga, gangguan pasokan, nilai tukar, dan tekanan geopolitik. Pada tingkat subnasional, Lampung berkontribusi sekitar 2,54% terhadap produksi kedelai nasional atau ± 17.470 ton pada periode 2015–2019. Temuan ini menegaskan bahwa diversifikasi pasokan ke Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika perlu dipadukan dengan penguatan produksi daerah, perbaikan lahan masam, varietas adaptif, tumpangsari, dan hilirisasi produk turunan. Secara konseptual, artikel ini mengisi celah kajian dengan mempertautkan politik perdagangan, kapasitas daerah, dan prinsip kemaslahatan. Integrasi ekonomi politik internasional dan hukum ekonomi Islam menjadi dasar tata kelola kedelai yang lebih resilien, adil, dan berkelanjutan bagi kedaulatan pangan nasional jangka panjang Indonesia.

Kata Kunci: Diplomasi komoditas; diversifikasi pasokan; kemaslahatan; produksi daerah; resiliensi pangan.

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025

Revised
August 02,
2025

Accepted
August 28,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kedelai dalam artikel ini diposisikan sebagai komoditas pangan strategis yang berada pada persilangan antara ekonomi politik internasional, ketahanan pangan, dan hukum ekonomi Islam. Sebagai bahan baku utama tempe dan tahu, kedelai tidak hanya berfungsi sebagai sumber protein nabati yang terjangkau, tetapi juga menopang ekonomi rakyat, industri rumah tangga, stabilitas konsumsi, dan keamanan pangan berbasis kedelai fermentasi (Tian et al., 2022). Dalam perspektif Hubungan Internasional, komoditas pangan tidak bersifat netral karena pasokan, harga, akses pasar, dan standar produk dibentuk oleh relasi kuasa, struktur rantai nilai, kebijakan negara pemasok, serta perubahan konfigurasi perdagangan global (Smith, n.d.; Steve Smith et al., 2016; Naseemullah, 2023;). Karena artikel ini berada dalam ruang lingkup Jurnal Tana Mana yang menekankan kajian syariah, hukum, dan ekonomi Islam, pembacaan ekonomi politik internasional tersebut perlu dikaitkan dengan prinsip kemaslahatan, keadilan distribusi, pencegahan mudarat, dan tanggung jawab negara dalam menjaga akses pangan masyarakat.

Indonesia masih menghadapi ketergantungan besar terhadap kedelai impor. Pada tahun 2021, impor kedelai Indonesia dilaporkan mencapai sekitar 7 juta ton, sementara sekitar 97% kebutuhan nasional masih dipenuhi dari pasar luar negeri. Ketergantungan tersebut menunjukkan kesenjangan serius antara kebutuhan konsumsi domestik dan kapasitas produksi nasional. Dari perspektif ekonomi politik internasional, kondisi ini memperlambat otonomi kebijakan Indonesia

karena stabilitas pasokan domestik sangat dipengaruhi oleh Amerika Serikat, Brasil, Argentina, serta dinamika pasar kedelai global yang dikendalikan oleh eksportir besar dan jaringan agribisnis internasional (Giraudó & Grugel, 2022; Montanía et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024; Yan et al., 2023; Pusdatin, 2022; Sibuea et al., 2024; Khumairah et al., 2025).

Kerentanan tersebut tidak hanya muncul dari volume impor, tetapi juga dari ketidakpastian rantai pasok global. Fluktuasi harga kedelai dapat dipengaruhi oleh bencana alam, konflik ekonomi, perang tarif, perubahan kebijakan dagang, gangguan distribusi, dan tekanan biaya input pertanian seperti pupuk (Morão, 2025). Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, serta volatilitas harga pangan dunia menunjukkan bahwa stabilitas pangan domestik tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar global (Kurniawan & Luthfi, 2023; Hamulczuk et al., 2023; Ihle et al., 2022; Amarachi Queen Olufemi-Phillips et al., 2024; Jia et al., 2024; Neik et al., 2023; Wang et al., 2022; Zhao & Gao, 2025). Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, ketergantungan yang menimbulkan kerentanan harga dan pasokan dapat menjadi sumber mudarat bagi produsen kecil, pelaku usaha olahan kedelai, dan konsumen rumah tangga (Iskandar et al., 2024; Junaidi et al., 2024).

Sejumlah kajian telah membahas perdagangan kedelai dari sisi daya saing, kebijakan impor, tarif, struktur pasar, produktivitas, dan keberlanjutan produksi. Namun, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung memisahkan antara analisis perdagangan internasional, strategi produksi domestik, dan penilaian normatif ekonomi Islam. Di sinilah letak gap analisis artikel ini. Persoalan kedelai Indonesia belum cukup dijelaskan apabila hanya dibaca sebagai masalah produksi pertanian atau impor pangan. Ia perlu dipahami sebagai persoalan posisi negara dalam struktur ekonomi politik internasional, sekaligus sebagai persoalan keadilan ekonomi karena dampaknya langsung dirasakan oleh petani, UMKM pangan, pengrajin tahu-tempe, dan konsumen. Dengan kata lain, gap utama yang hendak dijawab artikel ini adalah belum terbangunnya kerangka yang menghubungkan ketergantungan impor, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan, kapasitas produksi daerah, dan prinsip kemaslahatan dalam satu analisis yang utuh.

Atas dasar itu, diversifikasi sumber pasokan harus dibaca sebagai strategi ekonomi politik internasional, bukan sekadar keputusan teknis perdagangan. Diversifikasi memungkinkan negara importir memperluas ruang negosiasi, mengurangi konsentrasi risiko, dan membangun strategi hedging terhadap tekanan geopolitik. Perluasan relasi dengan Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin dapat memperkuat posisi Indonesia, tetapi harus dikaji secara selektif berdasarkan stabilitas politik, biaya logistik, standar produk, kebijakan tarif, hambatan hijau, dan kapasitas kelembagaan mitra (Setiadi et al., 2021; Ssenkugu, 2024; Gebriella et al., 2024; Jiang et al., 2023; Jiang & Chen, 2020). Namun, diversifikasi tidak boleh hanya memindahkan ketergantungan dari satu pemasok ke pemasok lain. Strategi ini perlu diarahkan pada penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global melalui produk turunan seperti bungkil dan minyak kedelai.

Di sisi lain, diversifikasi perdagangan tidak akan memadai apabila tidak disertai penguatan produksi domestik. Agenda produksi lokal perlu ditempatkan sebagai strategi memperkuat daya tawar Indonesia dalam perdagangan pangan global, bukan sebagai kebijakan pertanian yang terpisah dari hubungan internasional. Berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan kedelai Indonesia berkaitan dengan daya saing, kebijakan tarif, kelayakan usaha tani, varietas adaptif, produktivitas, dan dukungan kelembagaan petani (Agung & Apsari, 2025; Sinta et al., 2017; Krisdiana et al., 2021; Mardiyati et al., 2023; Prasetiaswati et al., 2022). Dalam konteks ini, Lampung menjadi wilayah subnasional yang relevan karena memiliki pengalaman produksi kedelai, kedekatan geografis dengan pasar Sumatra-Jawa, dan potensi pengembangan pertanian pada lahan masam.

Penguatan Lampung penting karena resiliensi pangan tidak hanya dibentuk oleh kebijakan impor di tingkat nasional, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam menyediakan pasokan, mengembangkan klaster produksi, memperbaiki rantai nilai, dan memperluas distribusi manfaat ekonomi. Dalam konteks Lampung, pengembangan pola tumpangsari jagung-kedelai, perbaikan lahan masam, pertanian sirkular, dan penguatan rantai nilai daerah dapat dikaitkan dengan agenda ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi Islam berbasis kemaslahatan (Endriani et al., 2021; Slameto & Meidaliyantisyah, 2023; Antara, 2026; Dinas Kominfo Provinsi Lampung, 2025; Ashari et al., 2020; Vikas & Ranjan, 2024; Swastika et al., 2024; Anikwe & Ife, 2023; Salvador et al., 2022).

Dengan demikian, posisi analitis artikel ini adalah menghubungkan tiga ranah yang selama ini sering berjalan terpisah: ekonomi politik internasional tentang ketergantungan komoditas,

strategi diversifikasi dan diplomasi ekonomi, serta hukum ekonomi Islam tentang kemaslahatan dan keadilan distribusi. Artikel ini menawarkan pembacaan bahwa tata kelola kedelai Indonesia harus dibangun melalui integrasi antara diversifikasi pasokan, hilirisasi produk turunan, penguatan produksi daerah, dan perlindungan kelompok ekonomi rentan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis politik perdagangan kedelai Indonesia periode 2014–2024 dengan fokus pada ketergantungan impor dalam struktur rantai pasok global, strategi diversifikasi pasokan dan pasar produk turunan, serta kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi domestik yang adil, resilien, dan berkelanjutan.

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi dokumen dan analisis kebijakan. Desain ini dipilih karena politik perdagangan kedelai Indonesia tidak hanya berkaitan dengan defisit produksi domestik, tetapi juga dengan posisi Indonesia dalam struktur ekonomi politik internasional, ketergantungan terhadap pemasok utama, perubahan rantai pasok global, dan ruang manuver diplomasi komoditas. Dalam kerangka Hubungan Internasional, kedelai dipahami sebagai komoditas strategis yang dipengaruhi oleh relasi kuasa pasar global, kebijakan negara eksportir, dan kepentingan negara importir dalam menjaga stabilitas pangan nasional (Mas'ood, 1990; Giraud, 2020).

Desain penelitian ini memadukan analisis ekonomi politik internasional dengan perspektif hukum ekonomi Islam. Integrasi tersebut digunakan untuk menilai apakah kebijakan impor, diversifikasi pasokan, dan penguatan produksi domestik telah mencerminkan kemaslahatan, keadilan distribusi, pencegahan mudarat, serta perlindungan terhadap kelompok ekonomi rentan, terutama petani, pelaku usaha tahu-tempe, dan konsumen rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan dinamika perdagangan kedelai, tetapi juga menilai arah kebijakannya secara normatif dalam kerangka tata kelola ekonomi yang adil.

Objek penelitian adalah politik perdagangan kedelai Indonesia pada periode 2014–2024. Unit analisis disusun pada tiga level yang saling terkait: level global berupa struktur pasar kedelai dan negara eksportir utama; level nasional berupa kebijakan impor, diversifikasi mitra, dan produk turunan kedelai; serta level subnasional berupa kontribusi Lampung dalam memperkuat produksi domestik. Desain bertingkat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa resiliensi kedelai Indonesia tidak dapat dijawab hanya melalui impor, tetapi memerlukan integrasi antara diplomasi perdagangan, kapasitas produksi daerah, dan prinsip kemaslahatan publik (Pusdatin, 2022; Junaidi et al., 2024).

Teori Dan Konsep

Penelitian ini menggunakan kerangka ekonomi politik internasional untuk membaca kedelai sebagai komoditas strategis yang berada dalam pertemuan antara pasar global, kepentingan negara, dan keamanan pangan domestik. Dalam kajian Hubungan Internasional, perdagangan pangan tidak bersifat netral karena selalu dipengaruhi oleh relasi kuasa, posisi tawar, kebijakan negara eksportir, kepentingan korporasi agribisnis, serta perubahan geopolitik. Oleh karena itu, ketergantungan impor kedelai Indonesia tidak hanya dipahami sebagai defisit produksi, tetapi sebagai persoalan posisi negara dalam struktur perdagangan pangan global (Mas'ood, 1990; Smith et al., 2016; Gao et al., 2024).

Teori ketergantungan digunakan untuk menjelaskan relasi asimetris antara negara importir dan negara eksportir. Ketika pasokan kedelai Indonesia terkonsentrasi pada sedikit negara pemasok, ruang kebijakan nasional menjadi terbatas karena harga, ketersediaan, dan stabilitas pasokan domestik sangat dipengaruhi oleh aktor eksternal. Ketergantungan semacam ini menempatkan Indonesia sebagai penerima risiko dalam rantai nilai global, terutama ketika terjadi fluktuasi harga, gangguan logistik, perubahan kebijakan ekspor, atau konflik geopolitik (Giraud, 2020; Giraud & Grugel, 2022; Edet et al., 2024).

Konsep resource dependence memperkuat analisis tersebut dengan menekankan bahwa aktor yang bergantung pada sumber daya eksternal cenderung memiliki posisi tawar lebih lemah. Dalam konteks kedelai, ketergantungan terhadap pemasok utama membuat Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan pangan nasional dengan dinamika pasar internasional. Karena itu, diversifikasi pasokan bukan sekadar pilihan teknis, melainkan strategi politik ekonomi untuk

mengurangi kerentanan, memperluas pilihan kebijakan, dan memperkuat daya tawar negara dalam rantai pasok global (Hillman et al., 2009; Jiang et al., 2023).

Konsep resiliensi pangan digunakan untuk menilai kemampuan negara menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan pasokan kedelai di tengah tekanan eksternal. Resiliensi tidak cukup dibangun melalui impor, tetapi memerlukan kombinasi antara diplomasi komoditas, diversifikasi mitra, penguatan produksi domestik, dan hilirisasi produk turunan. Dalam kerangka ini, negara yang memiliki sumber pasokan lebih beragam dan basis produksi internal lebih kuat akan lebih mampu merespons guncangan pasar global (Jia et al., 2024; Junaidi et al., 2024).

Diplomasi ekonomi menjadi konsep penting untuk menjelaskan strategi negara dalam memperluas ruang manuver perdagangan. Diversifikasi ke Asia, Eropa Timur, Amerika Latin, dan Afrika tidak hanya diarahkan untuk mencari pemasok atau pasar baru, tetapi juga untuk mengurangi dominasi pemasok tradisional dan membangun posisi tawar yang lebih fleksibel. Perang dagang, konflik Rusia-Ukraina, hambatan tarif, dan perubahan konfigurasi perdagangan internasional menunjukkan bahwa pangan merupakan bagian dari kepentingan strategis negara (Kurniawan & Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022).

Perspektif hukum ekonomi Islam digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah kebijakan kedelai menghasilkan kemaslahatan atau justru menimbulkan mudarat. Kedelai berkaitan langsung dengan pengrajin tahu-tempe, petani, pedagang kecil, dan konsumen rumah tangga. Karena itu, kebijakan impor, diversifikasi, dan penguatan produksi domestik harus dinilai dari kemampuannya menjaga stabilitas harga, keadilan distribusi, perlindungan kelompok rentan, dan kedaulatan pangan. Efisiensi pasar tidak cukup apabila manfaat ekonomi terkonsentrasi pada importir besar dan risiko harga ditanggung masyarakat kecil (Musari, 2024; Varzakas & Smaoui, 2024).

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini menempatkan diversifikasi perdagangan dan penguatan produksi daerah sebagai strategi yang saling melengkapi. Diversifikasi diperlukan untuk mengurangi risiko eksternal, sedangkan produksi daerah diperlukan untuk memperkuat kapasitas internal. Lampung diposisikan sebagai simpul subnasional yang relevan karena memiliki potensi produksi, kedekatan dengan pasar Sumatra-Jawa, serta peluang pengembangan tumpangsari dan rantai nilai kedelai. Dengan demikian, kebijakan kedelai yang ideal adalah kebijakan yang mengintegrasikan diplomasi perdagangan, kapasitas produksi domestik, dan prinsip kemaslahatan dalam tata kelola ekonomi yang adil (Slameto et al., 2021; Slameto & Meidaliyantisyah, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketergantungan Kedelai dalam Struktur Ekonomi Politik Perdagangan Global

Ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor menunjukkan bahwa persoalan kedelai bukan sekadar defisit produksi domestik, melainkan problem posisi negara dalam struktur ekonomi politik pangan global. Dalam perspektif Hubungan Internasional, perdagangan pangan selalu terkait dengan relasi kuasa, kepentingan negara, kendali rantai pasok, dan posisi tawar antara eksportir dan importir. Negara eksportir utama memiliki kapasitas produksi, infrastruktur logistik, dan pengaruh harga yang lebih kuat, sedangkan negara importir seperti Indonesia harus menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan pasar global (Mas'ood, 1990; Giraudo, 2020).

Struktur pasar kedelai global memperlihatkan kecenderungan konsentrasi pada aktor-aktor utama. Kondisi ini membuat negara importir rentan terhadap perubahan harga, gangguan logistik, kebijakan ekspor, perang dagang, dan konflik geopolitik. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan pada Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina mempersempit ruang manuver kebijakan pangan karena stabilitas kedelai domestik sangat ditentukan oleh dinamika eksternal (Montanía et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024).

Kerentanan tersebut semakin penting karena kedelai bukan hanya komoditas dagang, tetapi juga komoditas sosial-ekonomi. Kedelai menjadi bahan utama tempe dan tahu yang dikonsumsi luas masyarakat serta menopang banyak pelaku usaha kecil. Ketika harga kedelai impor meningkat, dampaknya langsung dirasakan oleh pengrajin tahu-tempe, pedagang kecil, dan konsumen rumah tangga. Karena itu, ketergantungan impor kedelai tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga pada daya beli, stabilitas pangan, dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, kebijakan kedelai harus dinilai dari kemampuannya menjaga kemaslahatan dan mencegah mudarat. Impor dapat menjadi instrumen stabilisasi jangka pendek, tetapi menjadi problematik apabila berubah menjadi ketergantungan permanen yang melemahkan petani lokal, memperbesar risiko harga, dan menguntungkan aktor distribusi besar. Prinsip keadilan distribusi menuntut agar negara tidak hanya menjamin ketersediaan kedelai, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dan risikonya tidak timpang.

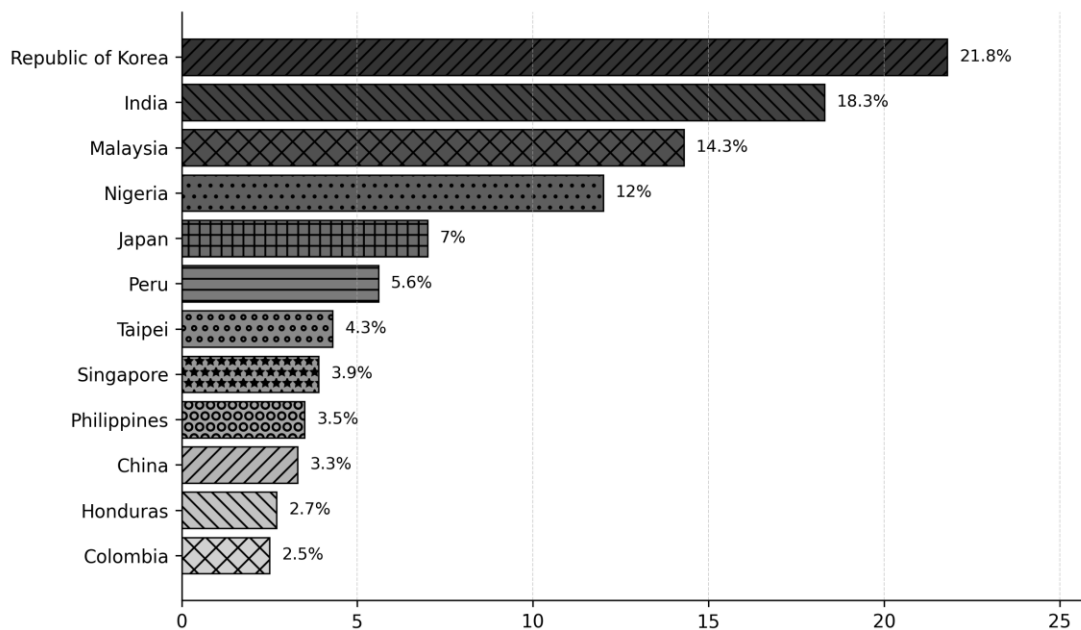
Dengan demikian, resiliensi kedelai Indonesia harus dibangun melalui dua jalur. Pertama, jalur eksternal melalui diversifikasi pemasok, diplomasi komoditas, dan pengurangan konsentrasi pasokan. Kedua, jalur internal melalui penguatan produksi daerah, perbaikan tata niaga, dan hilirisasi produk turunan. Tanpa produksi domestik, diversifikasi impor hanya memindahkan ketergantungan dari satu pemasok ke pemasok lain. Sebaliknya, tanpa strategi perdagangan adaptif, produksi domestik sulit menjawab kebutuhan jangka pendek nasional.

Diversifikasi Pasokan sebagai Strategi Diplomasi Ekonomi

Diversifikasi pasokan kedelai merupakan strategi ekonomi politik untuk memperluas ruang manuver Indonesia dalam perdagangan pangan global. Strategi ini tidak hanya diarahkan untuk mencari pemasok baru, tetapi juga memperkuat posisi tawar dalam negosiasi harga, volume, standar mutu, kontrak, dan kesinambungan pasokan. Semakin beragam sumber pasokan, semakin besar fleksibilitas negara importir dalam menghadapi tekanan pasar, perubahan kebijakan negara eksportir, dan hambatan perdagangan internasional (Kumari & Bharti, 2021; Zhao & Gao, 2025).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, diversifikasi dapat dibaca sebagai strategi hedging ekonomi. Indonesia perlu menghindari ketergantungan berlebihan pada satu negara, kawasan, atau blok perdagangan tertentu karena rantai pasok pangan sangat rentan terhadap keputusan politik negara besar. Perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok dan konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa komoditas pangan tidak pernah sepenuhnya netral, melainkan selalu berada dalam hubungan antara pasar, negara, korporasi, logistik, dan geopolitik (Kurniawan & Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022; Haveman, 2024).

Gambar 1 memperlihatkan bahwa produk kedelai Indonesia telah memiliki basis pasar regional, terutama di Republik Korea, India, dan Malaysia. Namun, konsentrasi pada beberapa mitra utama juga menunjukkan bahwa pasar tersebut belum cukup kuat untuk menempatkan Indonesia sebagai aktor penting dalam rantai nilai kedelai global. Karena itu, diplomasi ekonomi perlu diarahkan pada dua agenda: mempertahankan pasar yang sudah terbentuk melalui kualitas, sertifikasi, kepastian pasokan, dan standar perdagangan; serta membuka pasar tambahan di Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.



Gambar 1. Negara Pengimpor Produk Olahan Kedelai Indonesia

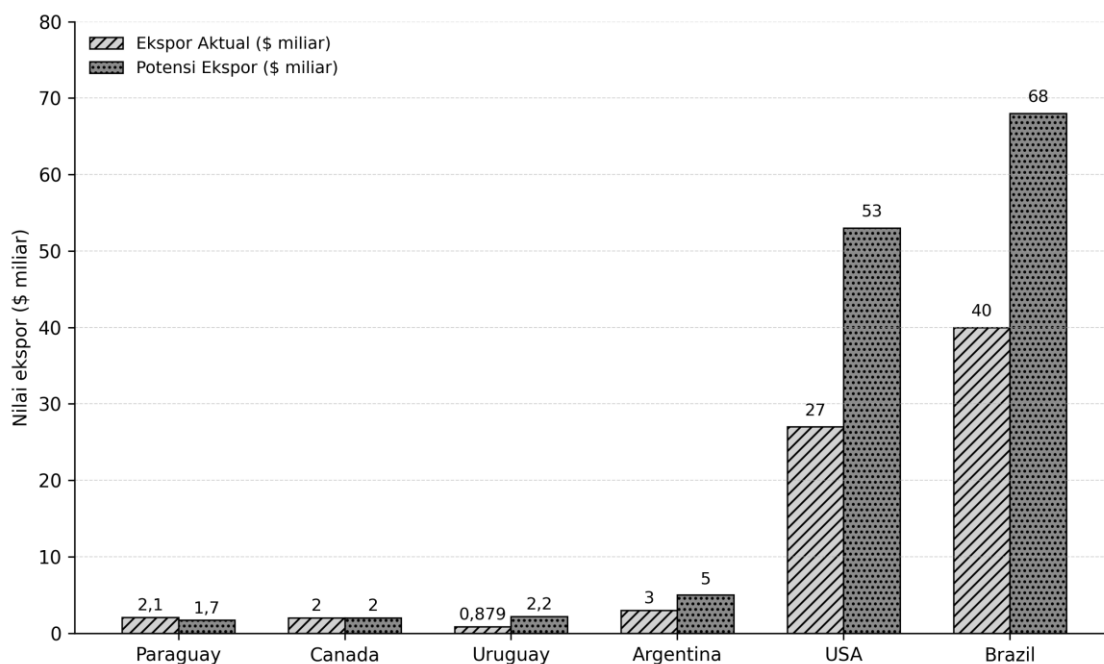
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, diversifikasi memiliki nilai kemaslahatan karena dapat mengurangi risiko kelangkaan, lonjakan harga, dan dominasi pasar. Namun, diversifikasi tidak boleh berhenti sebagai agenda impor, sebab hal itu hanya memindahkan ketergantungan dari satu pemasok ke pemasok lain. Strategi ini harus dipadukan dengan penguatan produksi domestik dan hilirisasi produk turunan agar nilai tambah dapat dinikmati oleh UMKM, koperasi, industri pangan lokal, petani, dan masyarakat daerah.

Celah Pasar Produk Turunan Kedelai dan Politik Nilai Tambah

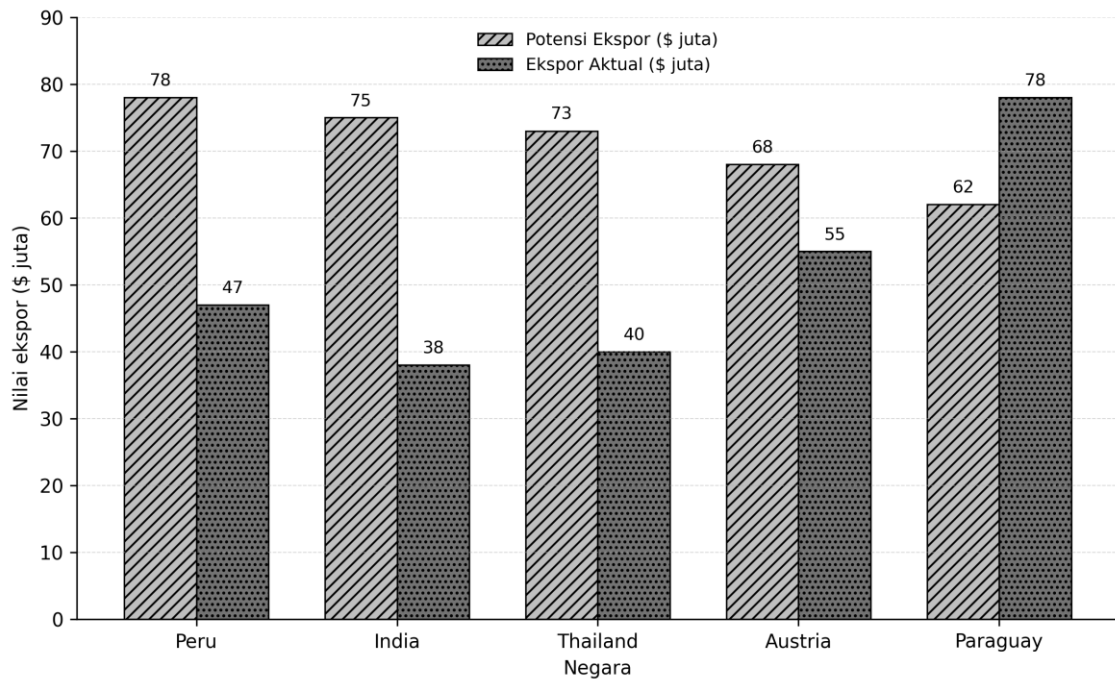
Kelemahan utama tata kelola kedelai Indonesia terletak pada orientasi yang masih terlalu besar terhadap kedelai sebagai bahan mentah. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, posisi negara dalam rantai nilai global tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pasokan, tetapi juga oleh kapasitas mengolah, menstandarkan, dan mendistribusikan produk bernilai tambah. Karena itu, kebijakan kedelai tidak cukup diarahkan pada stabilisasi impor, tetapi perlu diperluas pada hilirisasi produk turunan, peningkatan daya saing, dan penguatan industri pangan domestik (Harsono et al., 2022; Kahar et al., 2023).

Gambar 2, memperlihatkan bahwa perdagangan bungkil kedelai masih dikuasai oleh negara-negara dengan kapasitas produksi dan jaringan logistik kuat. Dominasi tersebut menunjukkan bahwa pasar produk turunan kedelai tidak sepenuhnya terbuka, tetapi dibentuk oleh struktur produksi, kendali distribusi, dan posisi tawar negara eksportir. Bagi Indonesia, data ini penting karena memperlihatkan bahwa hilirisasi kedelai tidak cukup dilakukan melalui produksi domestik, tetapi juga harus dibaca dalam konteks persaingan pasar global dan strategi masuk ke rantai nilai internasional (Montanía et al., 2021; Barboza Martignone et al., 2024).

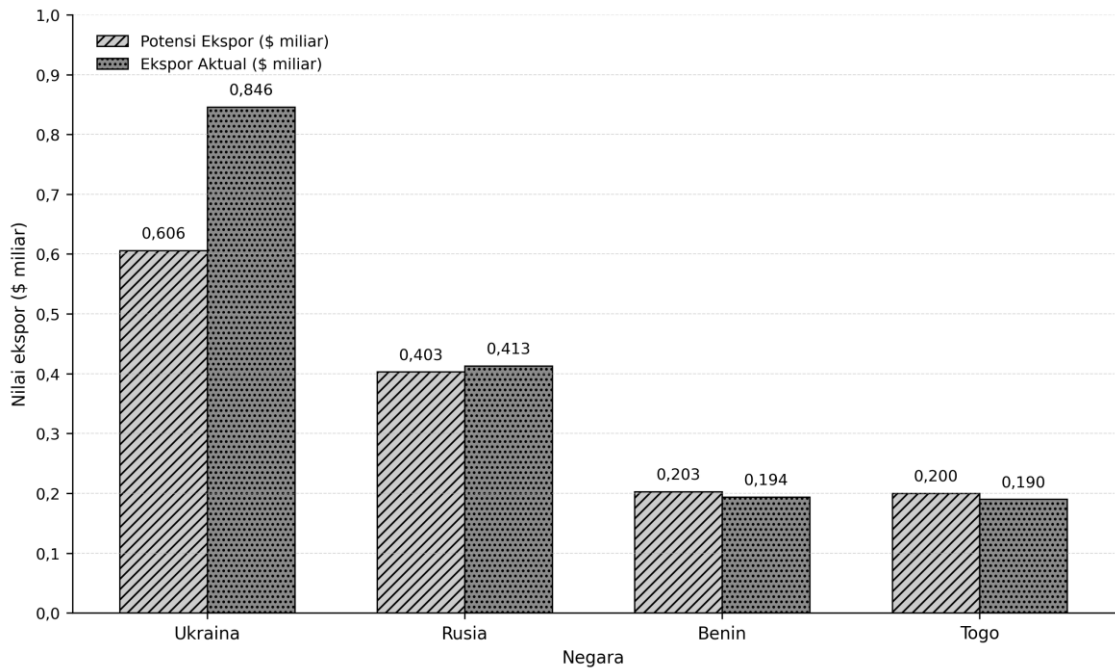


Gambar 2. Negara-Negara Potensi Ekspor *Seed Meal*
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti

Gambar 3 menunjukkan perbandingan antara potensi dan ekspor aktual bungkil kedelai pada beberapa negara. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ekspor menunjukkan bahwa pasar global tidak bersifat statis. Ruang masuk dapat terbentuk karena perubahan kapasitas produksi, hambatan distribusi, nilai tukar, konflik, kebijakan ekspor, atau kebutuhan negara tertentu untuk mendiversifikasi mitra dagang. Namun, peluang tersebut harus dibaca secara politis, bukan hanya komersial, karena kapasitas komoditas besar tidak selalu identik dengan keamanan pasokan. Risiko tarif, perang dagang, konflik geopolitik, dan gangguan logistik dapat mengubah akses pasar secara cepat (Ihle et al., 2022; Kurniawan & Luthfi, 2023).



Gambar 3. Negara Pengekspor Minyak Kedelai Potensial
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti



Gambar 4. Negara-Negara Potensi Dan Ekspor Aktual Soybean Meal
Sumber: Trademap ITC, diolah oleh peneliti

Benin dan Togo dalam **Gambar 3** menghadirkan pembacaan yang berbeda (Arda, 2025). Keduanya belum berada pada skala pasar sebesar negara produsen utama, tetapi dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Indonesia dalam membangun jejaring perdagangan Selatan-Selatan. Dalam kerangka diplomasi ekonomi, Afrika Barat dapat menjadi ruang kerja sama perdagangan, standardisasi produk, sertifikasi halal, investasi pertanian, dan pengembangan

kapasitas produksi. Namun, keterbatasan infrastruktur dan tata kelola ekspor tetap harus diperhitungkan agar diversifikasi tidak menciptakan ketergantungan baru. Dengan demikian, pengembangan produk turunan kedelai perlu ditempatkan sebagai politik nilai tambah yang menghubungkan diplomasi perdagangan, hilirisasi domestik, dan prinsip kemaslahatan, sehingga manfaat ekonomi dapat lebih banyak dinikmati oleh UMKM, koperasi, industri pangan lokal, petani, dan masyarakat daerah.

Minyak kedelai menunjukkan bahwa peluang kedelai tidak berhenti pada perdagangan bahan mentah, tetapi bergerak ke arah produk turunan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, posisi suatu negara dalam rantai nilai global ditentukan oleh kemampuannya mengolah, menstandarkan, dan mengakses pasar produk bernilai tambah. Karena itu, kebijakan kedelai Indonesia perlu bergeser dari orientasi stabilisasi impor menuju strategi hilirisasi, daya saing produk, dan penguatan industri pangan domestik (Harsono et al., 2022; Purnamasari et al., 2023).

Gambar 4 memperlihatkan bahwa Peru, India, Thailand, Austria, dan Paraguay memiliki karakter pasar yang berbeda. India dan Thailand relevan sebagai mitra kawasan karena kedekatan geografis dan keterhubungan ekonomi Asia. Peru dapat dibaca sebagai pintu masuk menuju pasar Pasifik dan Amerika Latin, sedangkan Austria membuka peluang akses ke pasar Eropa. Paraguay menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas ekspor aktual yang kuat dapat menjadi pembanding penting dalam membaca daya saing produk turunan kedelai. Variasi ini menegaskan bahwa diversifikasi pasar tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan harus disesuaikan dengan standar produk, logistik, regulasi, dan diplomasi perdagangan masing-masing mitra (Montanía et al., 2021; Jia et al., 2025).

Namun, peluang minyak kedelai tetap harus dibaca secara politis, bukan semata-mata komersial. Pasar produk turunan dipengaruhi oleh perubahan harga global, hambatan tarif, konflik geopolitik, dan pergeseran kebijakan negara besar. Dalam konteks ini, akses pasar tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada kemampuan negara membangun negosiasi, memperkuat sertifikasi, dan menjaga kepastian pasokan. Dengan demikian, minyak kedelai dapat menjadi instrumen diplomasi ekonomi untuk memperbaiki posisi Indonesia dalam rantai nilai global, bukan sekadar komoditas tambahan dalam perdagangan pangan (Kurniawan & Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022).

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, pengembangan produk turunan kedelai memiliki nilai kemaslahatan karena dapat memperluas distribusi manfaat ekonomi. Jika Indonesia hanya menjadi pasar bagi kedelai mentah impor, nilai tambah terbesar akan tetap berada pada negara produsen dan jaringan dagang global. Sebaliknya, penguatan minyak kedelai dan produk turunan lain dapat mendorong nilai tambah masuk ke ekonomi domestik, memperkuat UMKM, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas industri pangan lokal, serta memberi ruang manfaat yang lebih adil bagi petani dan masyarakat daerah.

Matriks Risiko Mitra dan Arah Diplomasi Komoditas

Diversifikasi kedelai tidak cukup dipahami sebagai penambahan daftar negara alternatif. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, pemilihan mitra dagang harus dibaca sebagai keputusan strategis yang mempertimbangkan harga, stabilitas politik, daya tawar, akses logistik, kedekatan kawasan, standar produk, serta risiko geopolitik. Karena itu, diversifikasi kedelai perlu dirancang sebagai diplomasi komoditas, yaitu upaya negara memperluas ruang negosiasi sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemasok tradisional. Perubahan rantai pasok akibat perang dagang dan konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa perdagangan pangan sangat dipengaruhi oleh keputusan politik negara besar, bukan semata-mata mekanisme pasar (Kurniawan & Luthfi, 2023; Ihle et al., 2022).

Tabel 1. Arah Kebijakan terhadap Negara Alternatif dalam Diversifikasi Kedelai

Negara/Kawasan	Peran Strategis	Risiko Utama	Arah Kebijakan Indonesia
India	Mitra Asia dengan kedekatan geografis dan potensi biaya produksi kompetitif.	Kebutuhan domestik tinggi dan surplus tidak selalu stabil.	Memperkuat kerja sama standar mutu, konektivitas logistik, dan skema perdagangan regional.
Tiongkok	Pasar besar untuk	Permintaan domestik	Memprioritaskan ekspor

	produk turunan kedelai dan memiliki infrastruktur logistik kuat.	sangat tinggi sehingga ruang pasok kedelai mentah terbatas.	produk olahan dan negosiasi akses pasar.
Ukraina/Rusia	Memiliki kapasitas produksi dan potensi komoditas besar.	Konflik, sanksi, risiko geopolitik, dan gangguan distribusi.	Menempatkan kerja sama sebagai opsi pelengkap, bukan tumpuan utama.
Peru	Akses menuju kawasan Pasifik dan Amerika Latin.	Biaya logistik jarak jauh relatif tinggi.	Mengembangkan diplomasi perdagangan berbasis APEC dan produk bernilai tambah.
Benin/Togo	Potensi kerja sama jangka panjang di Afrika Barat.	Infrastruktur dan tata kelola ekspor masih berkembang.	Membangun kerja sama kapasitas, standarisasi, dan investasi pertanian berkelanjutan.

Sumber: Disusun oleh peneliti berdasarkan sintesis data perdagangan dan literatur

Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap mitra memiliki fungsi strategis yang berbeda. India lebih relevan sebagai mitra kawasan untuk memperkuat konektivitas perdagangan Asia, sedangkan Tiongkok lebih realistis diposisikan sebagai pasar produk olahan karena besarnya permintaan domestik dan kuatnya infrastruktur logistik. Ukraina dan Rusia memiliki kapasitas komoditas, tetapi risiko konflik, sanksi, dan gangguan distribusi membuat keduanya tidak layak dijadikan tumpuan utama. Sementara itu, Peru, Benin, dan Togo lebih tepat dibaca sebagai ruang perluasan diplomasi perdagangan jangka menengah dan panjang, khususnya untuk membuka akses pasar baru dan memperluas jejaring Selatan-Selatan (Kumari & Bharti, 2021; Zhao & Gao, 2025).

Dengan demikian, matriks risiko diperlukan agar diversifikasi tidak mengganti ketergantungan lama dengan ketergantungan baru. Pasokan murah tidak selalu strategis apabila rapuh secara geopolitik, sedangkan pasar besar tidak selalu menguntungkan apabila standar masuk tinggi dan manfaatnya tidak terserap oleh pelaku domestik. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, diplomasi komoditas harus diarahkan pada keseimbangan antara maslahat dan mudarat: menjaga stabilitas pasokan, melindungi konsumen, memperkuat usaha kecil, serta memastikan bahwa nilai tambah perdagangan kedelai dapat kembali pada petani, UMKM, dan industri pangan lokal.

Lampung sebagai Simpul Produksi Subnasional dalam Resiliensi Kedelai

Diversifikasi perdagangan tidak cukup untuk membangun resiliensi kedelai. Indonesia tetap membutuhkan basis produksi domestik agar tidak terus berada dalam posisi bergantung pada pasar global. Dalam konteks ini, Lampung memiliki arti strategis sebagai wilayah subnasional yang dapat mendukung penguatan produksi kedelai. Posisi Lampung penting karena provinsi ini memiliki pengalaman produksi, kedekatan dengan pasar Sumatra dan Jawa, serta potensi pengembangan pertanian pada lahan yang membutuhkan inovasi budidaya.

Tabel 2. Luas Panen dan Produksi Kedelai di Beberapa Wilayah Lampung

Wilayah	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
Lampung Timur	2.315	3.293
Tanggamus	737	992
Pringsewu	481	647
Lampung Selatan	392	511
Mesuji	430	494
Pesisir Barat	217	309
Lampung Utara	162	216

Sumber: BPS Lampung 2016–2017, diolah kembali oleh peneliti

Tabel 2 menunjukkan bahwa produksi kedelai di Lampung tersebar di beberapa kabupaten. Lampung Timur menjadi wilayah dengan luas panen dan produksi paling besar, disusul Tanggamus dan beberapa wilayah lain. Pola sebaran ini memperlihatkan bahwa Lampung tidak harus dikembangkan melalui satu sentra tunggal. Pendekatan yang lebih tepat adalah membangun klaster antarkabupaten dengan pembagian fungsi antara produksi benih, budidaya, pascapanen, pengolahan, dan distribusi.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, penguatan daerah produksi seperti Lampung merupakan bagian dari strategi mengurangi kerentanan eksternal. Negara yang memiliki kapasitas produksi domestik lebih kuat akan memiliki posisi tawar lebih baik dalam negosiasi perdagangan. Produksi domestik tidak harus sepenuhnya menggantikan impor dalam waktu singkat, tetapi dapat menjadi instrumen penyeimbang agar Indonesia tidak sepenuhnya dikendalikan oleh harga dan pasokan global.

Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, penguatan Lampung juga berkaitan dengan keadilan distribusi. Kebijakan kedelai yang hanya bertumpu pada impor cenderung memberikan manfaat lebih besar kepada importir dan jaringan distribusi besar. Sebaliknya, penguatan produksi daerah dapat memperluas manfaat kepada petani, penyuluh, koperasi, pengolah lokal, dan pelaku usaha kecil. Dengan demikian, produksi kedelai daerah bukan hanya agenda teknis pertanian, tetapi juga bagian dari pemerataan manfaat ekonomi.

Lampung memiliki keunggulan geografis karena dekat dengan pasar Sumatra dan Jawa. Keunggulan ini dapat mengurangi biaya distribusi apabila didukung oleh infrastruktur logistik yang memadai. Selain itu, pengalaman Lampung dalam produksi jagung membuka peluang pengembangan pola tumpangsari jagung-kedelai. Pola ini dapat membantu petani mengelola risiko pendapatan, memperbaiki pemanfaatan lahan, dan memperluas pasokan bahan baku pangan maupun pakan domestik (Slameto et al., 2021; Slameto & Meidaliyantisyah, 2023).

Namun, tantangan Lampung juga nyata. Sebagian wilayah memiliki karakter lahan masam yang dapat membatasi produktivitas kedelai. Karena itu, kebijakan produksi tidak cukup dilakukan melalui perluasan lahan. Penguatan produksi membutuhkan varietas adaptif, perbaikan tanah, pendampingan teknis, akses pembiayaan, tata air, dan kepastian pasar. Tanpa unsur-unsur tersebut, produksi lokal akan sulit bersaing dengan kedelai impor yang memiliki skala produksi dan dukungan logistik lebih besar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan kedelai Indonesia berada pada titik temu antara struktur perdagangan pangan global, keterbatasan kapasitas produksi domestik, dan tuntutan keadilan ekonomi dalam perspektif hukum ekonomi Islam. Ketergantungan impor yang tinggi menempatkan Indonesia dalam relasi ekonomi politik internasional yang asimetris, karena pasokan, harga, dan stabilitas kedelai domestik sangat dipengaruhi oleh negara eksportir utama, korporasi agribisnis, infrastruktur logistik, perubahan nilai tukar, serta dinamika geopolitik. Dalam konteks ini, kedelai tidak dapat dibaca hanya sebagai komoditas pertanian, tetapi sebagai komoditas strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional, daya tawar negara, dan perlindungan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa stabilisasi impor memang diperlukan dalam jangka pendek, tetapi tidak cukup untuk membangun resiliensi pangan apabila tidak diikuti oleh diversifikasi pasokan, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan, dan penguatan produksi daerah.

Artikel ini menegaskan bahwa tata kelola kedelai perlu dibaca melalui dua lapis analisis yang saling melengkapi. Lapis pertama adalah ekonomi politik internasional, yang menjelaskan bagaimana struktur pasar global, relasi kuasa, dan posisi tawar negara importir membentuk kerentanan Indonesia. Lapis kedua adalah hukum ekonomi Islam, yang menilai apakah kebijakan impor, diversifikasi, dan penguatan produksi domestik mampu menjaga kemaslahatan, keadilan distribusi, dan perlindungan kelompok ekonomi rentan. Dengan cara baca ini, isu kedelai tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis produksi atau perdagangan, tetapi sebagai isu strategis yang mempertemukan diplomasi ekonomi, kapasitas daerah, dan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi-studi terdahulu yang menegaskan bahwa perdagangan kedelai global berada dalam struktur pasar yang terkonsentrasi dan dipengaruhi oleh aktor besar. Giraudo dan Grugel (2022) menunjukkan bahwa ketergantungan pada komoditas dapat membentuk kerentanan struktural dalam pembangunan ekonomi. Montanía et al. (2021) dan

Barboza Martignone et al. (2024) menegaskan bahwa eksportir utama memiliki pengaruh besar dalam arah perdagangan kedelai global. Ihle et al. (2022) serta Hamulczuk et al. (2023) memperlihatkan bahwa konflik Rusia-Ukraina memperkuat tekanan terhadap harga dan rantai pasok komoditas. Dalam konteks Indonesia, Harsono et al. (2022), Iskandar et al. (2024), dan Junaidi et al. (2024) menunjukkan bahwa persoalan kedelai berkaitan dengan produktivitas, daya saing, teknologi budidaya, dan keberlanjutan rantai pasok domestik.

Kesamaan temuan penelitian ini dengan studi terdahulu terutama disebabkan oleh struktur persoalan yang sama, yaitu dominasi eksportir besar, lemahnya produksi domestik, dan tingginya ketergantungan negara importir pada pasar global. Namun, artikel ini berbeda dalam penekanan analisisnya. Pertama, ketergantungan impor tidak hanya dipahami sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan otonomi kebijakan dalam Hubungan Internasional. Kedua, penguatan produksi tidak hanya ditempatkan sebagai agenda pertanian nasional, tetapi juga sebagai strategi memperbaiki posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global. Ketiga, Lampung diposisikan sebagai simpul produksi subnasional yang dapat memperkuat basis internal resiliensi pangan Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional, diversifikasi pasokan perlu dipahami sebagai strategi untuk memperluas ruang manuver Indonesia, bukan sekadar penambahan daftar negara pemasok. Diversifikasi yang efektif harus mempertimbangkan risiko geopolitik, biaya logistik, standar produk, hambatan tarif, stabilitas politik, dan kepastian pasokan. Karena itu, mitra seperti India, Tiongkok, Ukraina/Rusia, Peru, Benin, dan Togo tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang sama. India dan Tiongkok lebih relevan dibaca dalam kerangka konektivitas pasar Asia dan produk turunan, sedangkan Ukraina dan Rusia harus ditempatkan sebagai opsi pelengkap karena risiko konflik dan gangguan distribusi. Peru, Benin, dan Togo dapat menjadi bagian dari perluasan diplomasi perdagangan jangka menengah dan panjang, tetapi tetap memerlukan pembacaan terhadap kesiapan infrastruktur, standardisasi, dan tata kelola ekspor.

Selain diversifikasi pasokan, penelitian ini menegaskan pentingnya politik nilai tambah melalui produk turunan kedelai. Bungkil dan minyak kedelai menunjukkan bahwa peluang Indonesia tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan bahan mentah, tetapi juga pada kemampuan masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi. Gambar 2 dan Gambar 3 memperlihatkan bahwa perdagangan bungkil kedelai masih dibentuk oleh kapasitas produksi, kendali logistik, dan variasi antara potensi serta ekspor aktual negara tertentu. Sementara itu, Gambar 4 menunjukkan bahwa pasar minyak kedelai memiliki karakter mitra yang berbeda, seperti Peru, India, Thailand, Austria, dan Paraguay. Perbedaan karakter pasar ini menegaskan bahwa hilirisasi tidak cukup dilakukan melalui produksi, tetapi juga membutuhkan standardisasi, sertifikasi, negosiasi pasar, dan diplomasi perdagangan yang lebih aktif.

Lampung menjadi penting karena resiliensi kedelai Indonesia tidak mungkin dibangun hanya dari sisi perdagangan luar negeri. Data produksi di beberapa wilayah Lampung menunjukkan bahwa daerah ini memiliki pengalaman dan potensi sebagai basis produksi subnasional. Namun, kontribusi tersebut perlu diperkuat melalui klaster produksi, perbaikan lahan masam, varietas adaptif, tumpangsari jagung-kedelai, pascapanen, distribusi, dan pengolahan produk turunan. Dalam kerangka ekonomi politik internasional, penguatan Lampung dapat memperbaiki posisi tawar Indonesia karena negara yang memiliki kapasitas produksi internal lebih kuat tidak sepenuhnya bergantung pada fluktuasi pasar global. Dalam kerangka hukum ekonomi Islam, penguatan produksi daerah juga memperluas keadilan distribusi karena manfaat ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada importir besar, tetapi juga mengalir kepada petani, koperasi, pelaku usaha kecil, dan masyarakat lokal.

Kontribusi artikel ini terletak pada penyusunan kerangka terpadu yang menghubungkan ketergantungan impor, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan, produksi daerah, dan prinsip kemaslahatan. Kerangka ini memperlihatkan bahwa tata kelola kedelai tidak cukup diarahkan pada stabilisasi harga, tetapi harus dibangun sebagai kebijakan lintas sektor yang menghubungkan perdagangan internasional, pertanian daerah, industri pangan, dan perlindungan sosial-ekonomi. Dengan demikian, pembahasan kedelai tidak hanya relevan bagi kajian perdagangan internasional, tetapi juga bagi kajian hukum ekonomi Islam yang menempatkan keadilan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan sebagai dasar penilaian kebijakan.

Implikasi akademik penelitian ini adalah perlunya memperluas kajian Hubungan Internasional terhadap isu pangan strategis dengan memasukkan dimensi hukum ekonomi Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perdagangan pangan bukan hanya soal efisiensi pasar, tetapi

juga soal relasi kuasa, distribusi risiko, dan tanggung jawab negara dalam menjaga kemaslahatan publik. Implikasi kebijakannya adalah perlunya tata kelola kedelai yang lebih terpadu antara perdagangan internasional, kebijakan pertanian, pemerintah daerah, koperasi, industri pangan, dan pelaku UMKM. Pemerintah perlu menyusun matriks risiko mitra dagang, memperkuat diplomasi komoditas, membuka pasar produk turunan, dan menjadikan Lampung sebagai salah satu laboratorium kebijakan produksi kedelai berbasis daerah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa kebijakan kedelai yang ideal harus menggabungkan rasionalitas ekonomi politik internasional dan prinsip hukum ekonomi Islam. Ekonomi politik internasional menjelaskan bagaimana struktur pasar global, relasi kuasa, dan diplomasi komoditas membentuk pilihan kebijakan Indonesia. Hukum ekonomi Islam memberikan dasar normatif agar kebijakan tersebut tidak hanya mengejar stabilitas pasokan dan efisiensi pasar, tetapi juga menjaga kemaslahatan, keadilan distribusi, perlindungan pelaku usaha kecil, keberlanjutan petani, dan kedaulatan pangan. Integrasi kedua perspektif ini menjadikan kedelai sebagai isu strategis yang relevan bagi perdagangan internasional sekaligus bagi tata kelola ekonomi yang adil, resilien, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan kedelai Indonesia bukan sekadar defisit produksi, melainkan isu resiliensi pangan dalam struktur ekonomi politik internasional yang asimetris. Ketergantungan impor yang mencapai sekitar 97% kebutuhan nasional, terutama dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina, membuat pasokan kedelai domestik rentan terhadap volatilitas harga, nilai tukar, kebijakan dagang, konflik geopolitik, dan gangguan rantai pasok global. Pada saat yang sama, kontribusi Lampung terhadap produksi kedelai nasional masih sekitar 2,54% atau ±17.470 ton pada periode 2015–2019, dengan Lampung Timur mencatat 2.315 ha luas panen dan 3.293 ton produksi, serta Tanggamus 737 ha dan 992 ton. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan kedelai tidak cukup bertumpu pada impor sebagai instrumen stabilisasi jangka pendek, tetapi harus diintegrasikan dengan diversifikasi mitra, diplomasi komoditas, hilirisasi produk turunan seperti bungkil dan minyak kedelai, serta penguatan produksi daerah. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, tata kelola kedelai perlu diarahkan pada kemaslahatan, keadilan distribusi, perlindungan pelaku usaha kecil, keberlanjutan petani, dan kedaulatan pangan nasional.

REFERENSI

- Agung, I. G., & Apsari, A. (2025). Analysis of the Impact of Import Tariff Policy on Soybean Import Demand in Indonesia. 3(5), 1–10. <https://doi.org/10.61292/birev.197>
- Amarachi Queen Olufemi-Phillips, Abbey Ngochindo Igwe, Adekunle Stephen Toromade, Nsiong Louis Eyo-Udo, & Titilope Tosin Adewale. (2024). Global trade dynamics' impact on food pricing and supply chain resilience: A quantitative model. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 24(2), 492–519. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.2.3350>
- Anikwe, M. A. N., & Ife, K. (2023). The role of soil ecosystem services in the circular bioeconomy. *Frontiers in Soil Science*, 3(November), 1–18. <https://doi.org/10.3389/fsoil.2023.1209100>
- Antara, Kantor Berita Indonesia. (2026) "Lampung Kembangkan kedelai 1.000 hektare kurangi ketergantungan impor". Terbit 4 Juni 2026. <https://www.antaraneews.com/berita/5594121/lampung-kembangkan-kedelai-1000-hektare-kurangi-ketergantungan-impor>
- Arda, The Association of Religion Data Archives. (2025) Benin and Togo Major World Religions. <https://www.thearda.com/world-religion/national-profiles?u=221c>
- Ashari, Sharifuddin, J., Mohammed, Z. A., & Ramli, N. N. (2020). Green Revolution's Role and Impact: Organic Farming Potential for Indonesian Sustainable Agriculture Peran dan Dampak Revolusi Hijau: Potensi Usaha Tani Organik untuk Pertanian Berkelanjutan di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 37(2), 115–125. <http://dx.doi.org/10.21082/fae.v37n2.2019.115-125>
- Barboza Martignone, G. M., Ghosh, B., Behrendt, K., & Papadas, D. (2024). Leadership shift in the global soybean market: Dynamic connectedness approach (TVP-VAR). *Heliyon*, 10(16), e36071. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e36071>
- Dinas Kominfo Provinsi Lampung. (2025). "Panen Kedelai di Lampung Utara jadi Simbol Kolaborasi Pemerintah dan TNI Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional". Terbit pada 29 Oktober 2025. <https://lampungprov.go.id/detail-post/panen-kedelai-di-lampung-utara-jadi>

- simbol-kolaborasi-pemerintah-dan-tni-wujudkan-kedaulatan-pangan-nasional
- Edet, E. A., Adie, D., & Umahi, J. E. (2024). Dependency Theory and Development Policy in A 21st Century Context. *Journal of Political Discourse*, 2(4 (2)), 124–132. Retrieved from <https://jopd.com.ng/index.php/jopdz/article/view/243>
- Endriani, Rivaie, A. A., Barus, J., Meithasari, D., & Asnawi, R. (2021). Improving the quality of acid soils to increase soybean yields and farmer's incomes. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 648(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/648/1/012059>
- Gao, J., Wang, F., Liu, B., Liu, F., & Nielbo, K. L. (2024). Fundamental limits to economic development in developing and underdeveloped countries imposed by global hierarchy. *Structural Change and Economic Dynamics*, 68(November 2023), 298–312. <https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.11.001>
- Gabriella Sagina Hutabarat, Akim, & Darmansjah Djumala. (2024). Expansion of Indonesian Trade in the Pacific Region Through Increasing Indonesian Trade - Papua New Guinea. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 263–273. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i1.899>
- Giraud, M. E. (2020). Dependent development in South America: Tiongkok and the soybean nexus. *Journal of Agrarian Change*, 20(1), 60–78. <https://doi.org/10.1111/joac.12333>
- Giraud, M. E., & Grugel, J. (2022). Imaginaries of Soy and the Costs of Commodity-led Development: Reflections from Argentina. *Development and Change*, 53(4), 796–826. <https://doi.org/10.1111/dech.12714>
- Hamulczuk, M., Pawlak, K., Stefańczyk, J., & Gołębiewski, J. (2023). Agri-Food Supply and Retail Food Prices during the Russia-Ukraine Conflict's Early Stage: Implications for Food Security. *Agriculture (Switzerland)*, 13(11). <https://doi.org/10.3390/agriculture13112154>
- Harsono, A., Harnowo, D., Ginting, E., & Adi Anggraeni Elisabeth, D. (2022). Soybean in Indonesia: Current Status, Challenges and Opportunities to Achieve Self-Sufficiency. *Legumes Research - Volume 1*. <https://doi.org/10.5772/intechopen.101264>
- Haveman, H. (2024). Christopher Marquis and Kunyuan Qiao. Mao and Markets: The Communist Roots of Chinese Enterprise. *Administrative Science Quarterly*, 69(1), NP10–NP13. <https://doi.org/10.1177/00018392231207080>
- Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: A review. *Journal of Management*, 35(6), 1404–1427. <https://doi.org/10.1177/0149206309343469>
- Ihle, R., Bar-Nahum, Z., Nivievskiy, O., & Rubin, O. D. (2022). Russia's invasion of Ukraine increased the synchronisation of global commodity prices. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 66(4), 775–796. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12496>
- Iskandar, R., Kurniawan, B. P. Y., Hidayat, T., Malika, U. E., & Galushasti, A. (2024). Assessing the Sustainability and Performance of Local Soybean Production in Indonesia: A Multidimensional Scaling Analysis. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 19(2), 539–5748. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190211>
- Jia, J., Yang, W., Wu, F., & Cui, X. (2024). Elevated diversity of the supply chain boosts global food system resilience. *Environmental Research Letters*, 19(2). <https://doi.org/10.1088/1748-9326/ad2434>
- Jia, N., Yang, H., Lan, X., Li, Y., Song, Y., Zhang, Z., Song, W., Zhao, R., Ma, T., & Chen, R. (2025). Global soybean trade intensifies the impacts of dietary transition on human mobility. *IScience*, 28(5), 112426. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.112426>
- Jiang, H., Luo, Y., Xia, J., Hitt, M., & Shen, J. (2023). Resource dependence theory in international business: Progress and prospects. *Global Strategy Journal*, 13(1), 3–57. <https://doi.org/10.1002/gsj.1467>
- Jiang, X., & Chen, Y. (2020). The potential of absorbing foreign agricultural investment to improve food security in developing countries. *Sustainability (Switzerland)*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/su12062481>
- Junaidi, A., Mashar, A. Zum, Basrowi, Muharomah, D. R., Situmorang, J. W., Lukas, A., Asgar, A., Herlina, L., Manalu, L. P., & Payung, L. (2024). Enhancing sustainable soybean production in Indonesia: evaluating the environmental and economic benefits of MIGO technology for integrated supply chain sustainability. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 221–234. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.003>
- Kahar, F. A., Fadah, I., Wahyudi, E., & Wardhono, A. (2023). Does Soybean in Indonesia Still Competitive?: A Policy Analysis Matrix Approach. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 15(2), 89. <https://doi.org/10.17977/um002v15i22023p089>

- Khumairah, F. H., Irwandhi, Hibatullah, F. H., Ambarita, D. D. M., Hendra, Islamiati, A., Nurbaity, A., Herdiyantoro, D., Kamaluddin, N. N., & Simarmata, T. (2025). Revealing the import dilemma and attributing factors to Indonesia's inability to achieve soybean self-sufficiency: a bibliometric analysis and systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 23(1). <https://doi.org/10.1080/14735903.2025.2492546>
- Krisdiana, R., Prasetiaswati, N., Sutrisno, I., Rozi, F., Harsono, A., & Mejaya, M. J. (2021). Financial feasibility and competitiveness levels of soybean varieties in rice-based cropping system of Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 13(15). <https://doi.org/10.3390/su13158334>
- Kumari, M., & Bharti, N. (2021). Linkages Between Trade Facilitation and Governance: Relevance for Post-COVID-19 Trade Strategy. *Millennial Asia*, 12(2), 162–189. <https://doi.org/10.1177/0976399620972346>
- Kurniawan, A., & Luthfi, K. R. (2023). Impact of the US-Tiongkok Trade War on Foreign Trade of Emerging Economies: Brazil, South Africa, and Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(2), 157–175. <https://doi.org/10.22146/JSP.69215>
- Mardiyati, S., Natsir, M., & Syafiuddin, S. (2023). Competitiveness and Policy of Soybean Farming in Jenepono Regency. *Jurnal Penelitian Pertanian Terapan*, 23(2), 234–244. <https://doi.org/10.25181/jppt.v23i2.2724>
- Mas'ood, Muchtar. (1990). *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Fasilitas Bersama Antar Universitas.
- Montanía, C. V., Fernández-Núñez, T., & Márquez, M. A. (2021). The role of the leading exporters in the global soybean trade. *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 67(7), 277–285. <https://doi.org/10.17221/433/2020-AGRICECON>
- Morão, H. (2025). The economic consequences of fertilizer supply shocks. *Food Policy*, 133(March), 102835. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102835>
- Musari, K. (2024). An Analysis of Islamic Helix in a Zero-Waste Soybean Business of Techno-Savvy Micro Enterprises for SDGs (Issue August). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3530-7.ch002>
- Naseemullah, A. (2023). The political economy of national development: A research agenda after neoliberal reform? *World Development*, 168, 106269. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106269>
- Neik, T. X., Siddique, K. H. M., Mayes, S., Edwards, D., Batley, J., Mabhaudhi, T., Song, B. K., & Massawe, F. (2023). Diversifying agrifood systems to ensure global food security following the Russia-Ukraine crisis. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1124640>
- Prasetiaswati, N., Adi, D., Elisabeth, A., Wahyu, G., & Susanto, A. (2022). The feasibility cultivation. 02006. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202236102006>
- Purnamasari, A. B., Imam Hidayat, S., & Andrian Syah, M. (2023). Analysis of Indonesia's Soybean Competitiveness. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 06(08), 3971–3976. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i8-47>
- Pusdatin. (2022). *Analisa Kerja Perdagangan Kedelai*. 12(1), 1–58.
- Rozi, F., Subagio, H., Elisabeth, D. A. A., Mufidah, L., Saeri, M., Supriyadi, Burhansyah, R., Kilmanun, J. C., Krisdiana, R., Hanif, Z., Astuty, E. D., & Putri, R. L. (2025). Indonesian foodstuffs in facing global food crisis: Economic aspects of soybean farming. *Journal of Agriculture and Food Research*, 19(January), 101669. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.101669>
- Salvador, R., Barros, M. V., Donner, M., Brito, P., Halog, A., & De Francisco, A. C. (2022). How to advance regional circular bioeconomy systems? Identifying barriers, challenges, drivers, and opportunities. *Sustainable Production and Consumption*, 32, 248–269. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2022.04.025>
- Setiadi, A., Santoso, S. I., & Setiawan, B. M. (2021). Performance of Soybean Farming in Java - Indonesia: Determinants and Improvement Strategies. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(4), 1–14.
- Sibuea, F. A., Sibuea, M. B., & Safitri, S. A. (2024). Indonesian Soybean Import in International Trade. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 21(1), 122–131. <https://doi.org/10.17358/jma.21.1.122>
- Sinta, I., Hasnah, H., & Yuzaria, D. (2017). The Effect of Import Tariff Policy on Indonesian Soybean Consumption and Production. *International Journal of Agricultural Sciences*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.25077/ijasc.1.2.26-32.2017>
- Slameto, & Meidaliyantisyah. (2023). Added Value Production of the Corn - Soybean Intercropping

- System on Rainfed Rice Land in the Third Planting Season in Lampung Selatan, Lampung Province. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1172(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1172/1/012006>
- Slameto, Meidaliyantisyah, & Barus, J. (2021). Implementation of Rice, Corn, Soybean Intercropping Planting System on Acid Land Agroecosystem in Lampung Area. Proceedings of the International Seminar on Promoting Local Resources for Sustainable Agriculture and Development (ISPLRSAD 2020), 13(Isplrsad 2020), 259–266. <https://doi.org/10.2991/absr.k.210609.041>
- Smith, S. (n.d.). RELATIONS THEORY TODAY.
- Ssenkugu, S. (2024). Trade Policies and Livestock Exports. International Journal of Livestock Policy, 3(1), 16–29. <https://doi.org/10.47941/ijlp.1748>
- Steve Smith, Amelia Hadfield, & T. D. (2016). Foreign policy: Theories, Actors, Cases. THIRD EDITION. Foreign Policy. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198708902.003.0004>
- Stockhammer, E., & Kohler, K. (2023). Learning from distant cousins? Post-keynesian economics, comparative political economy, and the growth models approach. Varieties of Capitalism: Second-Generation Perspectives, 56–75. <https://doi.org/10.4337/9781035312757.00006>
- Swastika, D. K. S., Priyanti, A., Hasibuan, A. M., Sahara, D., Arya, N. N., Malik, A., Ilham, N., Sayekti, A. L., Triastono, J., Asnawi, R., Sugandi, D., Hayati, N. Q., & Atman, A. (2024). Pursuing circular economics through the integrated crop-livestock systems: An integrative review on practices, strategies and challenges post Green Revolution in Indonesia. Journal of Agriculture and Food Research, 18(June), 101269. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101269>
- Tian, F., Woo, S. Y., Lee, S. Y., Park, S. B., Im, J. H., & Chun, H. S. (2022). Mycotoxins in soybean-based foods fermented with filamentous fungi: Occurrence and preventive strategies. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, 21(6), 5131–5152. <https://doi.org/10.1111/1541-4337.13032>
- Varzakas, T., & Smaoui, S. (2024). Global Food Security and Sustainability Issues: The Road to 2030 from Nutrition and Sustainable Healthy Diets to Food Systems Change. Foods, 13(2). <https://doi.org/10.3390/foods13020306>
- Vikas, & Ranjan, R. (2024). Agroecological approaches to sustainable development. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8(November). <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1405409>
- Wang, X., Zhang, L., Cheng, Q., Shi, S., & Niu, H. (2022). What drives risk in Tiongkok's soybean futures market? Evidence from a flexible GARCH-MIDAS model. Journal of Applied Economics, 25(1), 454–475. <https://doi.org/10.1080/15140326.2022.2046989>
- Yan, J., Xue, Y., Quan, C., Wang, B., & Zhang, Y. (2023). Oligopoly in grain production and consumption: an empirical study on soybean international trade in Tiongkok. Economic Research-Ekonomiska Istrazivanja, 36(2). <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2142818>
- Zhao, P., & Gao, S. (2025). Green trade barriers, financial support and agricultural exports. International Review of Economics and Finance, 97(September 2024), 103758. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.103758>